



Buletin Parlementaria

Nomor 1188/IV/II/2022 • Februari 2022



DPR Minta TNI-Polri Kawal Agenda Strategis Nasional



3 Gus Muhaimin Nilai
Pembangunan SDM
Butuh Keterlibatan
Negara



20 Sekjen DPR Dorong
Komitmen Bersama
Menuju Setjen DPR
yang Modern



9 772614 339005

DPR Minta TNI-Polri Kawal Agenda Strategis Nasional



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapim TNI-Polri yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Foto: Oji/nvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta TNI-Polri agar dapat mengawal agenda strategis nasional, yaitu Reformasi Struktural di TNI-Polri yang meliputi Pembangunan SDM (sumber daya manusia), infrastruktur, dan reformasi pelayanan publik. Hal itu ia sampaikan saat pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

“Pembangunan SDM personel TNI dan POLRI, sudah tentu akan diarahkan dalam membangun kapasitas personel yang profesional. Kemampuan profesional tersebut disertai dengan keandalan dalam menguasai perkembangan teknologi,” sebut Puan saat menyampaikan pidato di hadapan Rapim TNI-Polri, Selasa (1/3).

Saat ini, Puan menambahkan, profesionalitas disebut juga perlu dilengkapi dengan kemampuan yang humanis ketika personel TNI-Polri bertugas di lapangan berhadapan dengan rakyat. Di sisi lain, ia mengatakan pembangunan SDM TNI-Polri perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertebal karakter personel yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi.

Sehingga setiap personel TNI-Polri menjadi perekat untuk mempersatukan rakyat dalam menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Inilah tugas kebudayaan TNI-Polri yaitu membangun budaya toleran, budaya gotong royong, serta memperkuat kesadaran anak bangsa bahwa Indonesia dipersatukan oleh

Pancasila,” ujar mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, maka tidak mustahil kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. “Tidak akan ada lagi jati diri keindonesian, jati diri yang bisa dibanggakan,” sambung Puan.

Menurut legislator dapil Jawa Tengah V itu, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana TNI-

Polri merupakan satu upaya yang komprehensif untuk membangun kemampuan dan kekuatan alat negara dalam menjaga kedaulatan negara serta ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dibutuhkan kecermatan, sinergi, dan komitmen bersama mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaannya.

Puan juga berpesan agar TNI-POLRI dalam memberikan pelayanan publik, semakin dituntut bersikap profesional dan melayani rakyat dengan mempermudah urusan, pelayanan publik disertai dengan kejelasan prosedur, kejelasan biaya, dan ketepatan waktu urusan. “Menjadi tuntutan umum dari rakyat Indonesia, untuk melihat TNI-Polri yang melindungi dan mengayomi rakyat, bukan malah menimbulkan ketakutan,” pesan Puan. ■ ah/sf

Gus Muhaimin Nilai Pembangunan SDM Butuh Keterlibatan Negara



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri *talkshow* di Kantor Tribun Timur. Foto: Ist/ivl

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut negara adalah satu-satunya instrumen yang dapat merealisasikan tujuan dan target tersebut. Menurutnya negara harus punya investasi besar tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga pembangunan SDM.

“Di situ tidak ada yang bisa melakukan kecuali negara, pemerintah. Pemerintah harus memberikan investasi besar kepada dua hal itu. Kalau Pak Jokowi kemarin investasi infrastruktur, (tapi) kalau ingin mengejar ketertinggalan investasi yang harusnya *gede-gedean* adalah SDM,” tutur Gus Muhaimin saat menghadiri *talkshow* di Kantor Tribun Timur bertajuk ‘Politik Kesejahteraan dan Visi Pembangunan Indonesia Timur’ bersama pakar dan akademisi Sulawesi Selatan, di Makassar, Sulsel, Selasa (1/3).

Sebelumnya, Gus Muhaimin menilai cita-cita besar Indonesia mewujudkan kesejahteraan secara merata bisa dilakukan jika mampu mengoptimalkan pembangunan sains dan teknologi ditopang dengan kualitas SDM yang memadai. “Hanya dengan jalan merealisasikan riset, sains, teknologi dan industri ditopang dengan kualitas SDM yang memadai kita bisa mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan dengan cepat,” kata Gus Muhaimin lebih lanjut.

Politisi PKB itu lantas mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas dan perusahaan lokal untuk menciptakan sekaligus mencetak SDM profesional dan berdaya saing sesuai yang dibutuhkan. “Tidak zamannya lagi kita bergantung modal ilmiah dan dan teknologi dari pasar internasional. Hanya dengan cara itu (kolaborasi) masa depan menjadi milik kita semua,” ujar Gus Muhaimin. ■ hal/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto S.Sos., M.A. (Kabag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Metske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widaywati, Rosnita

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Riffiq Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Komisi I Minta **BAKTI** Kominfo Perhatikan Daerah *Blank Spot*



Foto bersama Tim Kunjuran Reses Komisi I DPR RI dengan mitra kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Foto: Singgih/nvl

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyampaikan bahwa masih terjadi *blank spot*, signal lemah di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, ia meminta Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk juga memperhatikan hal itu.

“Masih banyak terjadi *blank spot* dan signal lemah, padahal di daerah-daerah itu menjadi daerah pusat UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), pusat pariwisata dan lain sebagainya,” ungkap Bambang saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Palembang, Sumsel, Rabu (23/2).

Sebagaimana diketahui, BAKTI Kominfo hadir untuk mengatasi

kesenjangan digital dengan melakukan pembangunan akses *broadband*, khususnya di daerah yang belum terjangkau. Layanan ini menyediakan akses internet di Sekolah, Balai Latihan Kerja, Puskesmas, Balai Desa, Kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Sementara Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan bahwa produk hukumnya penugasan BAKTI untuk pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) hanya untuk di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) sudah tidak fleksibel, namun dalam pembangunan akses internet sudah bebas (flesible). “Walaupun ada keterbatasan tetapi dalam pembangunan akses internet

itu sudah ada keleluasaan BAKTI untuk membangun akses internet di wilayah-wilayah *non-commercial* tapi bisa menjangkau masyarakat luas,” ujar Bobby.

Merujuk data, Kominfo akan menyelesaikan pembangunan BTS di 7.904 desa/kelurahan sampai dengan tahun 2022, lebih cepat 10 tahun dari rencana awal penyelesaian di tahun 2032. Pada pertengahan tahun 2020 Kominfo melaporkan terdapat sekitar 9.113 daerah yang tidak terkover jaringan 4G dan 3.435 daerah non 3T yang juga tidak terkover jaringan ini. Jika ditotal, ada sekitar 12.548 daerah *blank spot* di Indonesia. Untuk Tahun Anggaran (TA) 2021, Kominfo menetapkan target BTS 4G sebanyak 4.200 desa/kelurahan yang tersebar di 3T. ■ skr/sf

Binda Bali dapat Bersinergi dengan Pemda Dorong Pemulihan Pariwisata



Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai salah satu fungsi Badan Intelijen Daerah (Binda) ialah berperan sebagai intelijen yang mampu melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah. Domain tersebut menurutnya dapat diterapkan kala

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas.
Foto: Agung/nvl

Binda Provinsi Bali ikut serta dalam memulihkan pariwisata Bali.

Hal tersebut Yan Permenas utarakan saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I ke Bali dengan mengadakan pertemuan dengan jajaran Binda Bali, membahas soal kesiapan deteksi dan cegah dini badan intelijen tersebut menyambut perhelatan P20 dan KTT G20 di Pulau Dewata nanti. Ia berharap tak hanya soal deteksi keamanan saja, tapi Binda Bali dapat berperan dalam sektor pariwisata.

“Jadi bukan hanya soal pengamanan pelaksanaan kegiatan saja. Tapi bagaimana Binda bersinergi dengan pemda bagaimana kesiapan pemda menjemput momen (P20 dan KTT G20) ini untuk membangkitkan pariwisata bali,” ujarnya dalam pertemuan tersebut yang dilaksanakan di Denpasar, Bali, Sabtu (19/2).

Upaya itu perlu dalam membangun kepercayaan masyarakat internasional bahwa Bali sudah siap dengan sektor pariwisatanya. Untuk itu Yan Permenas berharap pula kesiapan dari pemerintah daerah, agar informasi positif soal kondisi Bali dapat pula diupayakan oleh pemerintah daerah untuk disebarluaskan ke dunia internasional.

Menurut pengamatan politisi Partai Gerindra itu, beberapa maskapai asing sudah masuk ke Bali. Hal itu menjadi peluang positif untuk menunjukkan kesiapan Bali dalam menyambut para wisatawan, untuk itu ia berharap pemerintah daerah juga dapat menunjukkan kesiapan normalitas pariwisata.

“Sehingga pada saat tahun depan kunjungan wisatawan dapat mulai normal kembali. Karena kami sering lihat pusat mendorong strategi meningkatkan pariwisata dan ekonomi. Tapi di Bali tidak bisa hanya harapkan pusat saja, daerah sendiri juga harus menyiapkan,” pungkas legislator dapil Papua tersebut. ■ ah/sf

Rifqinizamy Dorong Pendekatan Kultural dalam Penyelesaian Sengketa Lahan di Kaltim

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur melakukan pendekatan kultural dalam penyelesaian sengketa lahan di Kaltim. Hal tersebut diungkapkannya usai mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Pj. Sekda Kaltim didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Kepala Ombudsman Kaltim, dan Kakanwil BPN Kaltim.

“Seringkali muncul pengakuan terhadap penguasaan lahan ketika ada pembangunan infrastruktur seperti Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) misalnya. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) kita perlu membuka pintu komunikasi yang intens dengan

masyarakat sekitar terutama masyarakat hukum adat yang selama ini menguasai secara fisik lahan tersebut. Kendati secara hukum formil mereka tidak (belum) memiliki sertifikat misalnya,” terang Rifqi di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (21/2).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, dalam konteks ini dirinya mendorong Kementerian ATR/BPN mencari solusi terbaik, agar lahan yang akan dibangun IKN tersebut *clear and clean* dan tidak menyisakan masalah krusial dan kultural di kemudian hari. Pendekatan kultural

ini untuk menghindari adanya potensi konflik horisontal antara negara dengan masyarakat setempat.

Seperti kasus pemblokiran ruas

Kilometer 6, Seksi 5 Tol Balsam yang ditutup warga RT 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur karena warga belum menerima pembayaran ganti rugi pembangunan lahan mereka yang kini membentang jalan tol.

“Kaltim ini sebagai daerah penyangga IKN, maka kita meminta Pemprov Kaltim memetakan potensi tenaga kerja misalnya dari bidang jasa konstruksi untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur IKN. Oleh karena itu, proses sertifikasi keahlian yang dibutuhkan harus segera dilakukan. Agar masyarakat lokal yang ingin dilibatkan dalam proyek infrastruktur ini memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti yang dibutuhkan,” tandasnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan dapil Kalimantan Selatan I ini juga berharap masyarakat Kaltim harus adaptif terhadap kemungkinan yang terjadi seperti adanya migrasi pendatang yang jumlahnya tidak kecil. “Akan terjadi migrasi pegawai ASN pusat dari Jakarta ke IKN yang baru di Kaltim ini, maka kami berharap

Pemprov perlu mengantisipasi terjadinya perubahan sosial sehingga masyarakat Kaltim harus adaptif,” tutupnya. ■ oji/sf



Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat mengikuti pertemuan Kunjuran Reses Komisi II DPR RI. Foto: Oji/nvl



Anggota Komisi II DPR RI Subardi. Foto: Ridwan/nvl

Kota Batam Miliki Keunggulan Letak Geografis Guna Pacu Pertumbuhan Ekonomi

”

BP BATAM MILIKI ANGGARAN SENDIRI, BAIK YANG BERASAL DARI MANAJEMEN INTERNAL PERUSAHAAN MAUPUN DARI PEMERINTAH PUSAT. PEMKOT BATAM PUN MEMILIKI ANGGARAN, BAIK YANG BERASAL DARI PAJAK LOKAL DI DAERAH TERSEBUT DALAM BENTUK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Anggota Komisi II DPR RI Subardi menilai Kota Batam memiliki keunggulan letak geografis yang strategis guna memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat dengan pengelolaan satu kepemimpinan Pulau Batam yang dijabat oleh Wali Kota Batam, baik dari sisi tata kelola administrasi pemerintahan daerah juga sebagai *ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Nah ini kan keduanya (BP Batam dan Kota Administrasi Batam) punya fungsi yang beda, tetapi tujuannya sama. Yaitu, dalam rangka menjadikan kota Batam kota industri, kota pariwisata, pertumbuhan ekonomi yang lebih maju daripada kota-kota lain. Karena letak geografisnya,” jelas Subardi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/2).

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. PP tersebut menyudahi dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan Kota Batam yang terjadi sebelumnya. Dengan adanya PP tersebut diatur bahwa Wali Kota Batam selain sebagai kepala pemerintahan daerah juga sebagai *ex-officio* Kepala BP Batam (Pasal 2A poin 1(a)).

Di sisi lain, menurut Subardi, BP Batam miliki anggaran sendiri, baik yang berasal dari manajemen internal perusahaan maupun dari pemerintah pusat. Pemkot Batam pun memiliki anggaran, baik yang berasal dari pajak lokal di daerah tersebut dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari pemerintah pusat melalui

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena itu, melimpahnya anggaran tersebut seharusnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kota Batam untuk lebih tinggi lagi.

“Karena itu dari sisi legislasi, kami butuh melihat kebijakan ini dan berikan rekomendasi atau saran kepada pemerintah pusat agar mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dari Batam ini, baik dari lembaga BP Batam maupun Pemkot Batam,” jelas Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini. ■ rdn/sf

Komisi III Soroti Peredaran Narkoba di Lapas Kaltara



Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan mitra kerja di Kaltara. Foto: Andri/nvi

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menyoroti peredaran narkoba yang cukup besar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Andi Rio mendapat informasi dari BNN, peredaran narkoba di Lapas Kaltara ini sudah berlangsung lama. Menurutnya ini menjadi persoalan 'klise' yang terus terjadi di lapas.

"Saya kurang mengerti dari laporan Pak Kakanwil yang mengatakan beliau sudah bekerja keras melakukan pelarangan penggunaan *handphone* di lapas untuk meminimalisir interaksi perdagangan narkoba yang diatur dari dalam lapas, tapi ya *tetep aja* hal

ini terus berulang," kata Andi Rio saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kemenkumham Kaltara, di Tarakan, Selasa (22/2).

Politisi Partai Golkar itu pun menyarankan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltara untuk memindahkan narapidana kasus narkoba yang mendapatkan hukuman berat untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. "Apa yang menjadi *momok* di sini, terjadinya bisnis di dalam lapas akibat masih adanya orang-orang yang menggerakkan bisnis narkoba dari dalam lapas. Jika hal ini terus berulang dan narapidana terkait perdagangan

narkoba sebaiknya dipindah ke Nusakambangan," tegas Andi Rio.

"Kata Kakanwil, persoalan biaya menjadi hambatan untuk memindahkan narapidana ke Nusakambangan, di sini tugas kami dari Komisi III menyampaikan kepada mitra dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM bahwa ada persoalan ini di lapangan. Dan ini juga tugas kami untuk memberikan anggaran, tugas kita Komisi III DPR RI ini untuk *support* semua yang dibutuhkan mitra Komisi III DPR RI demi berjalanya kegiatan penegakan hukum yang ada di Indonesia," sambung legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II tersebut. ■ man/sf

Komisi III Sarankan Lapas Perempuan Kelas II Palangka Raya Dipindah ke Kota

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat memberikan saran agar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Palangka Raya yang lokasinya ada di tengah hutan dan terletak 40 kilometer dari Kota Palangka Raya, untuk dipindah ke pusat kota, yang kemudian ditukar dengan lapas umum.

“Saya tahu Lapas Perempuan ada di tengah hutan dan bagi perempuan itu sangat mengkhawatirkan menurut saya. Dan saya apresiasi dalam hal ini, karena (pemindahan) sudah mulai dilakukan prosesnya,” ujar Ary usai mengikuti RDP Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah beserta jajaran, di Palangka Raya, Kalteng, Senin (21/2).

Politisi Partai NasDem itu juga mendengar ada penjelasan klasik mengenai *over capacity* di lapas, namun ia tetap memberi apresiasi kepada Kakanwil Kemenkumham Kalteng. Walaupun dengan kondisi seperti itu, Ary menilai jajaran Kemenkumham Kalteng masih mampu untuk mengelaborasi problematika yang ada di wilayah Kemenkumham Kalteng, sehingga semua dapat berjalan baik hingga saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham

Djaya mengakui Lapas Perempuan Kelas IIA di Kalteng cukup jauh dari kota. Menurut Ilham, pertimbangan dari sisi keamanan apabila ditempati oleh

lapas Perempuan yang notabene itu hampir 40 km dari kota dan tinggalnya itu di dalam hutan, sehingga ada kebijakan untuk dilakukan pertukaran dengan lapas umum yang ada di Kota Palangka Raya.

“Alhamdulillah dibantu oleh Ibu Ary Egahni selaku Anggota Komisi III DPR RI dapil Kalimantan Tengah yang mendorong anggaran untuk lapas Palangka Raya yang di dalam kota ditukar penghuninya menjadi lapas perempuan sehingga lingkungannya lebih aman,” jelas Ilham. Ia berharap proses administrasi tahun ini bisa selesai, sehingga pada akhir tahun bisa dilakukan pergeseran-pergeseran dengan cepat, untuk menekan persoalan *over capacity*. ■ eno/sf



Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat. Foto: Eno/rvi

Dualisme Pengelolaan PPS Belawan Harus Segera Berakhir



Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Foto: Ayu/nvl

Komisi IV DPR RI berharap dualisme pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan di Sumatera Utara dapat segera terselesaikan. Pasalnya, hal itu menjadi penyebab utama dari berbagai permasalahan yang ada pelabuhan terbesar kedua di Sumut, setelah pelabuhan perikanan Muara Baru itu.

“Hari ini, secara resmi kami mendapat informasi adanya dualisme pengelolaan Pelabuhan Perikanan Belawan ini, yakni antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Perindo. Ini harus segera diselesaikan, agar tidak ada saling lempar tanggung jawab dan pada akhirnya saling mencari kambing hitam atas berbagai permasalahan yang ada di pelabuhan

tersebut,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke PPS Belawan, Sumut, Senin (21/2).

Sebagaimana diakui baik KKP dan berbagai organisasi nelayan yang hadir di hadapan Komisi IV DPR RI, bahwa PPS Belawan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dimana infrastruktur yang rusak, becek dan minimnya berbagai fasilitas lain yang seharusnya dimiliki oleh pelabuhan perikanan besar. Seperti masih kurangnya panjang dermaga, belum adanya pabrik es dan kurangnya *cold storage*.

“Karena ini merupakan pelabuhan perikanan, menurut saya lebih baik ada di bawah pengelolaan KKP. Dengan begitu, nantinya KKP lah yang bertugas

untuk melakukan perbaikan berbagai infrastruktur, seperti jalan, penambahan panjang dermaga dan lainnya. Termasuk penyediaan berbagai fasilitas di PPS tersebut. Seperti pembangunan pabrik es dan *cold storage*, dan lain sebagainya,” tambah politisi PDI-Perjuangan ini.

Oleh karenanya, Komisi IV DPR RI mendorong penuh diselesaikannya dualisme pengelolaan PPS Belawan ini. Bahkan ke depan (memasuki masa sidang), Komisi IV akan membahas permasalahan ini dengan KKP, serta berbagai pihak terkait lainnya. Hal itu semata untuk meningkatkan fungsi PPS Belawan tersebut, termasuk meningkatkan produksi ikan. Pada akhirnya juga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan nelayan. ■ ayu/sf

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melibatkan Bulog untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kedelai. Menurut dia, Bulog tetap harus diberi peran dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan.

Akmal menjelaskan, Bulog dapat melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga di pasaran serta mengantisipasi kelangkaan. “Kalau mereka (swasta) menyimpan atau menimbun kita *enggak* tahu. Jadi, negara tidak punya instrumen untuk mengendalikan distribusi dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok warga kita,” kata Akmal usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Bulog Divre Sulselbar

Andi Akmal Minta Pemerintah Gandeng Bulog Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (20/2).

Selanjutnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, peranan Bulog menjadi *buffer stock* juga perlu diperkuat melalui dukungan anggaran. Sehingga, fungsi Bulog untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan juga kestabilan harga bisa terlaksana dengan baik.

“Misalnya, kalau harga jatuh kan dia (Bulog) bisa beli produk petani. Kalau harga melambung dia (Bulog)

bisa operasi pasar melepas, sehingga harga bisa terkendali. Ini yang tidak bisa dilakukan karena Bulog terbebani dengan utang komersil. Jadi fungsi Bulog tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik,” terang Akmal.

Akmal menuturkan, meski kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) telah diberlakukan sejak awal Februari namun ia menilai penerapan DMO agak terlambat. “DMO ini terlambat diterapkan sebenarnya, tiga bulan lalu kita sudah ingatkan tidak boleh ekspor kalau kebutuhan dalam negeri memang tidak tercukupi. Kedua, kita juga berharap satgas pangan bisa lebih cekatan dalam mencari distributor yang nakal dan menimbun sehingga menyebabkan harga naik dan langka,” katanya.

Selain penerapan DMO, Akmal juga mengimbau pemerintah meningkatkan pengawasan ekspor. Mengingat, selain bahan baku minyak goreng, CPO juga diproduksi menjadi biodiesel (B30). “Mendag punya data sebenarnya perusahaan yang melakukan ekspor.

Produksi CPO-nya berapa, produksi minyak gorengnya berapa. Ini menjadi tugas pemerintah untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut,” tandas Akmal. ■ ann/sf

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Anne/nvl



Komisi V Soroti Proyek Revitalisasi dan *Beautifulikasi* Bandara I Gusti Ngurah Rai

Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana menyoroti upaya revitalisasi dan *beautifulikasi* Terminal Penumpang Umum Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan dilakukan PT Angkasa Pura I dalam rangka persiapan infrastruktur untuk menyambut tamu internasional yang akan hadir pada puncak Presidensi G20 pada November mendatang.

PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sebelumnya menjelaskan melalui paparannya mengenai revitalisasi dan *beautifulikasi* dengan mengusung konsep *Balinese Architecture*. Namun, Eddy menilai rencana yang dijelaskan pihak PT Angkasa Pura kurang menonjolkan nilai arsitektur budaya Bali.

“Kalau dari yang kita lihat dari paparan yang diberikan, saya kira tidak keluar *Balinese Architecture* yang saya nilai harus dikedepankan” ujar Eddy Santana saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran PT Angkasa Pura I di Novotel I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (21/2).

Terkait kesiapan infrastruktur dalam rangka menyambut tamu di puncak acara Presidensi G20, politisi Partai Gerindra itu berpendapat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah sangat siap, namun sentuhan Bali tetap



Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana. Foto: Rizki/nvl

perlu ditonjolkan. “Secara keseluruhan bandara (I Gusti Ngurah Rai) itu sudah memenuhi syarat dan bagus, namun kita tetap membutuhkan sentuhan Bali sesuai dengan tujuan proyek ini,” ungkap Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menyoroti anggaran dalam proyek yang digagas oleh Angkasa Pura I tersebut, dimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu telah mengajukan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah sebesar Rp195 miliar, untuk pendanaannya.

Politisi Partai Golkar yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI itu mengkhawatirkan Angkasa Pura I tidak mampu menyelesaikan

proyek tersebut mengingat pengajuan anggaran tersebut hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. “Ada *beautifulikasi*, artinya apa mempercantik ini (Bandara I Gusti Ngurah Rai) dengan nuansa Bali. Sayangnya anggarannya masih menunggu Menteri Keuangan,” ujarnya.

Selain itu, batas waktu pengerjaan proyek yang sangat singkat juga menjadi perhatian Hamka. Namun, ia mengaku tidak ada masalah terkait besaran dana yang diajukan Angkasa Pura I mengingat tujuannya demi kepentingan bangsa dan negara. “Hanya terburu dengan waktu dan pengerjaan yang begitu besar, tetapi saya kira tidak ada masalah demi bangsa dan negara, hanya di situ saya *stressing-nya*,” tutup Hamka. ■ rr/sf

Komisi V Dukung Keberlanjutan Program Pembangunan *Long Storage* di Sidoarjo

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI mengunjungi *Long Storage*, yang terletak di Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dalam tinjauan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengapresiasi adanya wadah, serta sarana baru yang dapat berpotensi dan bermanfaat kedepannya bagi masyarakat sekitar.

“Saya ingin apresiasi proyek ini, dimana proyek ini sebetulnya sudah lama dikerjakan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita bisa lihat adanya manfaat, peluang dan potensi ke depannya, yaitu sebagai wadah

penyediaan air baku, di antaranya bisa untuk olahraga, wisata dan sebagainya,” pungkas Sigit di sela-sela peninjauan Komisi V DPR RI di Desa Kalimati, Sidoarjo, Jatim, Senin (21/2).

Sejak dimulai pembangunannya di tahun 2017 lalu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat akan adanya pertumbuhan ekonomi baru di Sidoarjo ke depannya. Hal ini sekaligus mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Sidoarjo. Peralnya keberadaan *Long Storage* Kalimati sangat penting dalam menunjang terpenuhinya air baku bagi warga Sidoarjo dan Mojokerto.

“Ini merupakan peluang besar, yang sekaligus bisa menjadi PAD baru bagi

”

KITA BISA LIHAT ADANYA MANFAAT, PELUANG DAN POTENSI KE DEPANNYA, YAITU SEBAGAI WADAH PENYEDIAAN AIR BAKU

daerah. Jadi program-program seperti yang diinisiasi oleh teman-teman Kementerian PUPR, seperti sumber daya air, ternyata berdampak signifikan dan langsung. Kita tinggal diskusikan, aturan-aturan seperti apa yang dapat dibuat nantinya,” tutur Sigit.

Kedatangan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI disambut baik oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko beserta jajarannya. Melihat antusias yang luar biasa, Sigit yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) Jatim I akan terus mendukung dan memantau hingga proyek ini selesai.

“Walaupun (proyek) belum 100 persen rampung, kita berharap akan lebih baik lagi ke depannya. Saya sekali lagi terima kasih, baik kepada Pak Dirjen maupun Pak Bupati, karena telah bekerjasama membersihkan dan merawat lahan ini. Saya kira kalau kabupaten kolaborasi dengan kementerian hasilnya ini bagus sekali,” yakin Sigit. ■ dip/sf



Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo di sela-sela peninjauan *long storage* Sidoarjo. Foto: Dipa/rvl

Rudi Hartono Bangun Soroti Rendahnya Penjualan dan Oversupply Semen Indonesia Group

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pertumbuhan volume penjualan PT Semen Indonesia Group (Persero) Tbk atau SIG sangat rendah, yaitu sebesar 2,5 persen *year-on-year* (yoy), padahal menurutnya cukup banyak proyek pembangunan infrastruktur negara yang memerlukan penggunaan material semen. Rudi menyarankan untuk mendorong SIG agar bisa melakukan pendekatan dengan kementerian terkait untuk mendapatkan peluang proyek infrastruktur negara sehingga ada peningkatan penjualan semen SIG.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Eselon 1 Kementerian Investasi/ BKPM, Eselon 1 Kementerian BUMN, Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk, Dirut PT Kawasan Industri Makassar (Persero), Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, serta Dirut PT Semen Tonasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/2).

“Dipaparkan oleh direktornya, tahun lalu (volume penjualan) hanya bisa mencapai 2,5 persen di targetnya, jadi sangat rendah kalau saya lihat. Banyak *project* infrastruktur seperti

jalan tol, bendungan, dan lain-lain yang membutuhkan semen jadi kenapa mereka (PT Semen Indonesia Group) susah untuk menaikkan target pemasaran dan penjualannya. Saya sampaikan ke direktornya (bahwa mereka) tidak maksimal berkerja dan harusnya mereka punya inisiatif melobi atau melalui kementerian, membuat MoU (Memorandum of Understanding) atau minta penugasan untuk mendistribusikan semen ke proyek infrastruktur negara, kan begitu seharusnya,” tegasnya.

Lebih lanjut,

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun.
Foto: Novel/nvl

politisi Partai NasDem ini juga menyoroti permasalahan *oversupply*/ kelebihan pada pasokan kapasitas produksi semen PT Semen Indonesia Group yang mencapai 50 juta ton per tahun berdasarkan pemaparan direksinya. Rudi menilai, SIG sendiri kurang memiliki inovasi maupun strategi untuk dapat memasarkan produk semennya yang berakibat *oversupply* tersebut.

“*Oversupply* itu kan akibat dia (SIG) tidak bisa memasarkan, tidak ada ide, dan inisiatif dari direktur marketingnya, mereka tidak punya inovasi, tidak punya banyak cabang pemasaran. Seperti tadi, proyek infrastruktur negara begitu banyaknya kenapa (semen SIG) tidak *di-supply* ke situ, kenapa tidak *di-lobby*, itu yang kita tanyakan tadi,” pungkask legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Di akhir, Rudi meminta PT Semen Indonesia Group agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba serta pajak yang maksimal sehingga masyarakat dapat menikmatinya dalam bentuk pembangunan infrastruktur negara. “Kita minta atas nama wakil rakyat, yang utama, bagaimana PT Semen Indonesia ini memberikan deviden yang maksimal dan juga pajak yang maksimal kepada negara, karena rakyat dan negara butuh itu untuk pembangunan kembali ke rakyat tadi dalam bentuk infrastruktur,” tutupnya. ■ nvl/sf



Kurangnya Atensi Pemerintah pada SRG Sebabkan Fungsinya Tidak Maksimal

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan kurangnya atensi oleh Pemerintah dan *stakeholder* terkait sistem resi gudang (SRG) menjadikan SRG tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Ia mencermati, SRG belum dipandang dan dipahami dengan baik oleh semua *stakeholder*, terutama pemerintah daerah dan juga kementerian yang harusnya terlibat dalam regulasi seperti Kementerian Dalam Negeri.

“Sehingga saat ini, baru sekitar 160 gudang yang dimiliki di seluruh Indonesia. Padahal, kita punya 496 Kabupaten/Kota,” kata Deddy di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Sucofindo (persero), Dirut Perum Bulog dan sejumlah *stakeholder* lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (21/2).

Hal itu, menurut Dedi, sangat jauh dengan capaian negara lain seperti Malaysia, meski SRG itu sendiri memiliki tren yang sangat baik setiap tahunnya. Resi gudang sendiri, menurut hematnya, memiliki manfaat yang strategis. “Karena resi gudang tidak hanya akan menguntungkan bagi petani dan bagi masyarakat luas, tapi lebih jauh bisa menjadi penjaga dari stabilitas bahan pokok,” tuturnya.

Meski, politisi PDI-Perjuangan itu



Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto: Fitri/nvl



UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENGOPTIMALKAN SRG BELUM MAKSIMAL. IA BERPANDANGAN HAL ITU KARENA KOMPLEKSITAS DARI SRG ITU SENDIRI. "KATAKANLAH DENGAN BERBAGAI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA JUGA DENGAN DUNIA PERBANKAN, PENGELOLAAN SWASTA, INI KAN SEMUA EKOSISTEMNYA BELUM TERBENTUK DENGAN BAIK,"

menilai bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan SRG belum maksimal, hal itu terjadi karena kompleksitas dari SRG itu sendiri. “Katakanlah dengan berbagai kementerian dan lembaga juga dengan dunia perbankan, pengelolaan swasta, ini kan semua ekosistemnya belum terbentuk dengan baik,” imbuh legislator dapil Kalimantan Utara itu.

Dia pun mendorong agar regulasi-regulasi yang berkaitan dengan SRG dilakukan perbaikan. “Juga termasuk bagaimana mendorong pemerintah daerah itu benar-benar serius dalam mendorong tumbuhnya gudang-gudang tempat menyimpan komoditas. Lalu bagaimana juga perbankan atau jasa keuangan yang bisa menopang daripada resi gudang ini, lalu kemudian bagaimana mitra-mitra yang mau bekerjasama membangun atau mengelola gudang,” tutup Deddy. ■ *srw/sf*



Anggota Komisi VII DPR RI Nasyrul Falah Amru saat mengikuti kunjungan Komisi VII DPR RI meninjau Pabrik Kebun Tebu Mas. Foto: Arief/nvl

Falah Amru: Petani Tebu di Lamongan Harus Mendapat Perhatian

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyrul Falah Amru mengatakan, petani tebu sebagai mitra dari KTM juga harus diberikan perhatian seperti ketersediaan pupuk dan pendukung lainnya sebagai penunjang menanam tebu. Falah menilai perusahaan Kebun Tebu Mas (KTM) merupakan salah satu industri gula terbesar di Lamongan, Jawa Timur, yang menggunakan teknologi yang sangat maju.

“Petani merupakan bagian dari sebuah lingkaran yang harus diperhatikan. Kalau (petani) tidak mampu membeli pupuk subsidi, harus mendapatkan semacam kredit KUR, dari pihak KTM bisa menjembatani karena KTM buat warga Lamongan ini bagian salah satu industri yang besar,” kata Falah saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI meninjau Pabrik Kebun Tebu Mas di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (19/2).

Falah juga menegaskan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk warga Lamongan harus lebih fokus dan ditingkatkan setiap tahunnya. “CSR dari tahun ke tahun harus ditingkatkan. Jangan kemudian kehadiran sebuah industri malah semakin memojokkan mereka tetapi harus meningkatkan kehidupan sekitar masyarakat di pabrik,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Di sisi lain, Falah melihat harus ada perhatian khusus pada pasokan *raw sugar* kepada KTM untuk meningkatkan kapasitas gula. “Selain investasi dengan nilai yang sangat tinggi, KTM juga memiliki mesin yang berteknologi sangat berarti, jika kekurangan bahan baku maka *raw sugar* harus diberikan perhatian yang lebih khusus. Sehingga ketika dia mengolah menjadi gula yang sudah jadi tentu akan kembali lagi kepada masyarakat Lamongan dan sudah barang tentu juga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Lamongan,” pungkas legislator dapil Jawa Timur X itu. ■ afr/sf

Hadapi Krisis, Andi Yuliani Paris Minta Pemerintah Lindungi UMKM

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menyatakan pemerintah harus melindungi UMKM, di antaranya di bidang kuliner, pada masa pandemi Covid-19. Satu di antaranya membantu menyediakan bahan baku makanan dari dalam negeri. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah berupaya mencari solusi penyediaan bahan baku makanan di Indonesia, satu di antaranya adalah komoditas gandum.

“Seperti India yang negara tropis, mampu menghasilkan gandum. Akan lebih baik Indonesia bisa. Industri tepung terigu menjadi vital bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan ini. Maka perlu diupayakan. Jangan

sampai kita selalu kekurangan bahan baku,” ungkap Andi Yuliani di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke PT Indofood Tbk – Divisi Bogasari, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (21/2).

Tidak hanya itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut meminta

”

INDUSTRI TEPUNG TERIGU MENJADI VITAL BAGI UMKM YANG BERGERAK DI BIDANG MAKANAN INI. MAKA PERLU DIUPAYAKAN. JANGAN SAMPAI KITA SELALU KEKURANGAN BAHAN BAKU

pemerintah juga tegas membuat sekaligus menerapkan kebijakan untuk melindungi UMKM. Komitmen pemerintah menjadi perhatiannya karena ia tidak ingin kasus minimnya stok minyak goreng sawit di Indonesia terulang.

“Kasus minyak goreng, bahan bakunya dari dalam negeri, tapi masyarakat pun sulit memperolehnya. Oleh karena itu, saya minta komitmen pemerintah untuk melindungi UMKM. Memang Indonesia tidak bisa langsung otomatis berhenti impor, Jika terjadi perubahan harga, kebijakan impor, *tax barrier*, yang nantinya akan berpengaruh pada ketersediaan pangan. Maka perlu adanya antisipasi,” tandas Andi Yuliani. ■ ts/sf

Anggota Komisi VII DPR RI
Andi Yuliani Paris. Foto: Saum/rvi

Hadiri *Parliamentary Hearing*, BKSAP DPR Bahas IPU ke-144 di Markas PBB

Memperoleh kepercayaan untuk menyelenggarakan *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-144, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong dan Presiden IPU Duarte Pacheco di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, Jumat, (18/2).

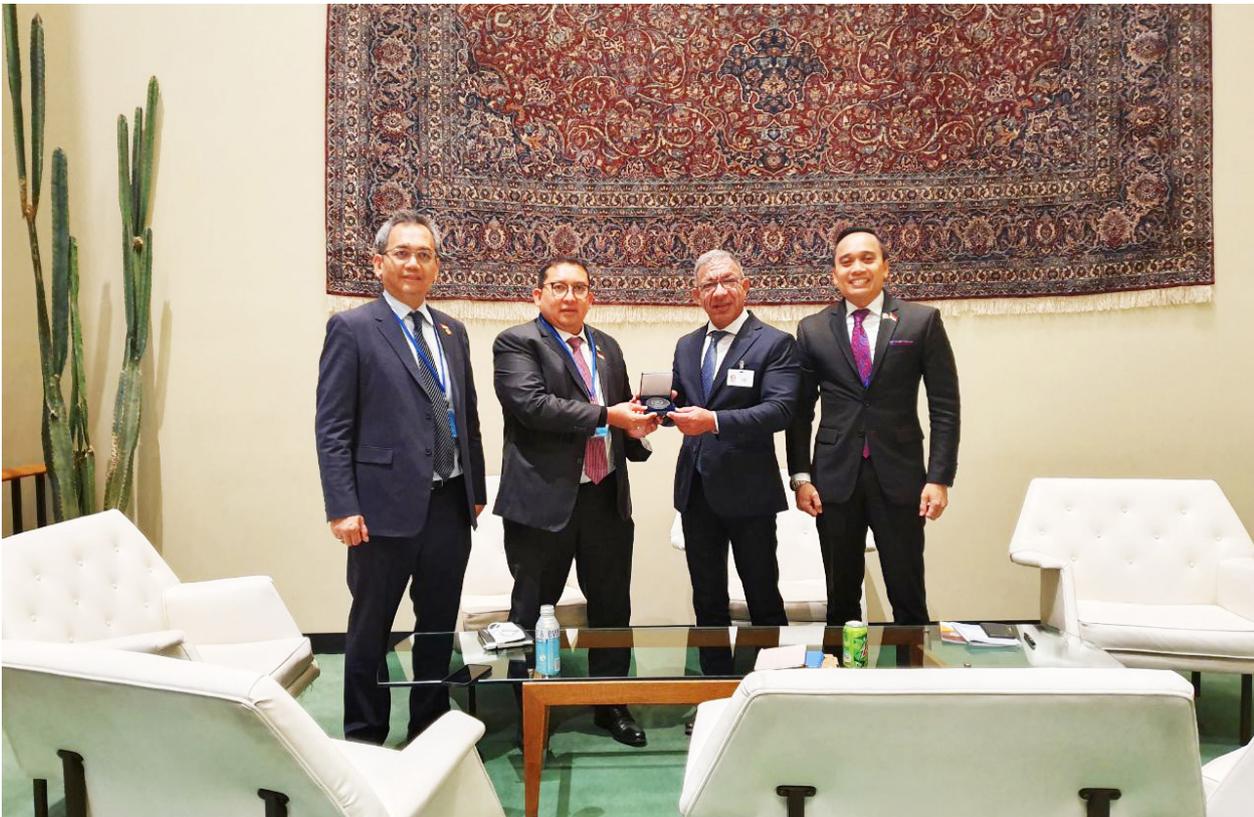
Bersama dengan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dan para Pimpinan BKSAP DPR RI Sihar Sitorus, Mardani Ali Sera, dan Achmad Hafisz Tohir, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, menjelaskan persiapan DPR RI untuk Sidang IPU ke-144 di Bali pada 20-24 Maret 2022 mendatang.

Selain membahas sekaligus mengundang para anggota parlemen IPU, politisi Partai Demokrat itu

menyampaikan generasi muda harus terlibat secara aktif dalam proses politik. Baginya hal ini harus menjadi prioritas setiap negara guna menjamin representasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Di tengah abad digital seperti saat ini, banyak generasi muda menggunakan sosial media sebagai sarana komunikasi. Ini menjadi peluang upaya edukasi politik serta membangun konektivitas digital ini juga menjadi tantangan bagi para anggota parlemen untuk mampu menjadi *role model* dalam proses demokrasi yang sehat bagi para pemuda,” tutur Putu.

Terakhir, dirinya pun menambahkan upaya DPR RI untuk melaksanakan edukasi politik bagi para pemuda di Indonesia. Hal tersebut di antaranya seperti melaksanakan Parlemen Remaja dan program Kampus Merdeka. Kegiatan tersebut membuat para mahasiswa dapat merasakan pengalaman terlibat dalam kerja parlemen secara langsung. ■ ts/sf



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon didampingi Pimpinan BKSAP DPR RI saat bertukar usai pertemuan di Markas Besar PBB New York. Foto: Ist/nvl

Baleg Tegaskan DPR-Pemerintah Sangat Cinta Papua

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan pembahasan pemekaran Provinsi Papua Barat yang tengah dibahas antara Baleg dengan Pemerintah Pusat serta Komisi II sebagai pengusul merupakan bukti kecintaan Parlemen dan Pemerintah terhadap Papua khususnya Provinsi Papua Barat. Terbukti, saat ini telah ada draf RUU dan naskah akademik yang sudah berada di Komisi II DPR RI.

Terkait hal itu, Supratman mengungkapkan dibutuhkan diskusi lanjutan antara Baleg dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal itu ia sampaikan saat audiensi Baleg DPR RI dengan Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat mengenai rencana usulan Provinsi Papua Barat Daya, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3).

“Saya tegaskan bahwa Parlemen dan pemerintah sangat cinta dengan Papua. Terbukti, saat ini baik naskah akademik maupun draf RUU-nya sudah masuk ke Badan Legislasi, yaitu tentang pemekaran dua provinsi dan empat pemekaran daerah baru yakni tiga di Papua dan satu di Papua Barat. Itulah bukti betapa Parlemen bersama Pemerintah mempunyai rasa cinta yang begitu luar biasa kepada Papua,” ujar Supratman saat pertemuan.

Namun demikian, ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini, tugas selanjutnya yaitu perlu adanya komunikasi dan dialog lebih lanjut dengan pemerintah berkaitan dengan alokasi pembiayaan. Mengingat, tandas Supratman, sudah menjadi komitmen politik yang tidak bisa ditawar lagi



Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas saat menerima masukan dari Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat. Foto: Munchen/nvl

bahwa pembahasan RUU tentang pemekaran Provinsi Papua Barat wajib segera diselesaikan.

Supratman menuturkan, jikalau ruang fiskal dan perekonomian Indonesia sudah berangsur kembali bergerak normal termasuk sektor perpajakan, maka tidak mustahil keseluruhan pembahasan draf RUU dapat diselesaikan. Terlebih, Baleg DPR RI dalam beberapa kali kesempatan telah melakukan pembicaraan informal baik dengan Kemenkeu dan Kemendagri terkait dengan rencana pemekaran wilayah, khususnya pemekaran di Papua Barat tersebut.

“Jadi bapak-ibu Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat semua tidak perlu khawatir. Sudah menjadi komitmen bersama antara Baleg dengan teman-teman di Komisi II DPR RI yang mengusulkan dimana terbukti draf RUU dan naskah akademiknya sudah ada. Selanjutnya, karena tidak dapat dipungkiri perlu ada yang namanya keputusan politik maka kedepannya akan segera kita diskusikan dengan pemerintah pusat baik dengan Kemenkeu maupun Kemendagri,” pungkas Supratman. ■ pun/sf

Sekjen DPR Dorong **Komitmen Bersama Menuju Setjen DPR yang Modern**

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengingatkan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan lembaga Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang profesional dan modern. Sebab lembaga yang

tanpa komitmen bersama itu, ia mengibaratkan layaknya pasir dalam genggaman.

“Tanpa komitmen, organisasi ini bagai pasir dalam genggaman, terlihat penuh namun begitu dibuka akan hampa tertiuap angin,” ujar Indra saat memberikan kata sambutan dalam rapat kerja Setjen DPR RI dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/2).

Dalam rapat itu tema yang diangkat ialah ‘Mewujudkan

Komitmen Bersama Menuju Setjen DPR RU yang Profesional dan Modern’. Untuk mewujudkan capaian tersebut, kata Sekjen, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh unit kerja.

“Sebab banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu melainkan karena mereka tidak memiliki komitmen,” ujar Indra. Adapun setiap tahun komitmen lembaga Setjen DPR RI telah diikat dalam suatu perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.

Indra pun merasa bersyukur bersyukur bahwa dari 13 Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021, semuanya mencapai target. Bahkan, ada tiga Indikator Kinerja yang di atas target yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI, Jumlah Program Diklat yang memperoleh akreditasi, dan Keterbukaan Informasi Publik.

“Ke depannya kami berharap kualitas kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI semakin meningkat dan semakin banyak kinerja yang dicapai atas tersebut. Saya kira ke depan

semua unit harus berkomitmen untuk memiliki titik yang terukur dan tetap memperbaiki capaian yang ada,” pungkas Indra. ■ ah/sf

Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
Foto: Bianca/nvl





Sekjen DPR RI Indra Iskandar dengan pejabat Setjen DPR RI foto bersama usai membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI. Foto: Runi/nvl

Sambut 74 CPNS 2021, Sekjen DPR Junjung Penerapan Nilai 'AKHLAK'

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi hasil rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 yang dilaksanakan secara adil dan terbuka. Ia menjelaskan, dari 5.617 pelamar dari seluruh Indonesia, diperoleh 74 Calon CPNS yang mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Rekrutmen seleksi CPNS tersebut merupakan salah satu implementasi *merit system* pada manajemen ASN di Setjen DPR RI. Semua putra dan putri Indonesia memiliki kesempatan sama untuk menjadi CPNS. saya dan jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI mengucapkan selamat kepada

”

**IA BERPELAN AGAR
PARA CPNS SETJEN
DPR RI TAHUN 2021
MENJADI APARATUR
YANG PEKERJA
KERAS, DINAMIS,
TERAMPIL, SEKALIGUS
MENGUASAI ILMU
PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DI
TENGAH SITUASI YANG
TIDAK PASTI AKIBAT
PANDEMI COVID-19.**

74 CPNS yang mendapatkan NIP. Selamat bergabung,” ucap Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1).

Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).

Sehingga, melalui nilai dasar ‘AKHLAK’ ini, ia berpesan agar para CPNS Setjen DPR RI Tahun 2021 menjadi aparatur yang pekerja keras, dinamis, terampil, sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah situasi yang tidak pasti akibat pandemi Covid-19.

“Jadi lakukan yang terbaik untuk anda, untuk keluarga, masyarakat dan untuk bangsa dan negara. Tugas dan tanggung jawab ada di pundak anda untuk menjadikan ASN kelas dunia dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), menjadi bangsa yang lebih sejahtera, serta bahagia,” tandas Indra. ■ ts/sf

GKSB DPR Dorong Perdamaian Ukraina-Rusia



Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Ukraina Sugeng Suparwoto saat menerima Duta Besar Ukraina. Foto: OJ/rvi

Ketua Grup Kerja Sama Antar Parlemen (GKSB) DPR RI-Parlemen Ukraina Sugeng Suparwoto menegaskan GKSB DPR RI mendorong segera terjadinya perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Maka, Sugeng meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk proaktif dalam segera melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan perdamaian kedua negara karena telah berimplikasi sangat luas terhadap kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai 110 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

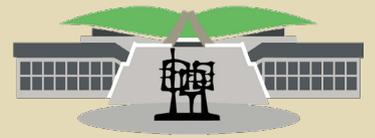
Kenaikan harga minyak dunia tersebut pun terasa langsung dampaknya memberatkan daya beli masyarakat Indonesia. Demikian

ditegaskan Sugeng usai menerima kunjungan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia H.E. Mr. Vasyl Hamianin diskusi perkembangan terkini situasi di Ukraina, yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3). Turut hadir dalam pertemuan itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti.

“Perang Rusia dan Ukraina berdampak sangat luas yang sangat terasa implikasinya terhadap Indonesia. Terutama, mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia yang sudah menyentuh 110 dolar per barel dan gas per hari ini yang mencapai 775 dolar per metrik ton yang akan sangat berpengaruh terhadap

kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. Sehingga, GKSB DPR RI dengan segera meminta Pemerintah Indonesia proaktif melakukan upaya perdamaian kedua negara,” ujar Sugeng lebih lanjut.

Ketua Komisi VII DPR RI ini menyatakan aspek kemanusiaan jauh lebih penting untuk dikedepankan meski banyak sektor proyek strategis nasional Indonesia yang berasal dari Ukraina maupun juga Rusia. “Tempuhlah dahulu diplomasi perdamaian Rusia dengan Ukraina. Kita tahu banyak sekali proyek-proyek strategis nasional Indonesia dari Ukraina dan juga Rusia, tetapi terlebih dari nilai-nilai ekonomi ada aspek yang jauh lebih penting yakni aspek-aspek kemanusiaan,” pungkask politisi Partai NasDem itu. ■ pun,ps/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat meninjau banjir di Kecamatan Glagah dan Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu (2/3). Foto: Ist/nvl



Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat memimpin rakor terkait mekanisme *handling* kedatangan dan kepulangan delegasi IPU ke-144 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Rabu (2/3). Foto: Jaka/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dengan pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI foto bersama usai pelepasan pegawai pensiun Setjen DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3). Foto: Jaka/nvl





The 144th IPU

(Inter-Parliamentary Union)

**Assembly &
Related Meetings,
Nusa Dua, Indonesia,
20-24 March 2022**

